

**GERAKAN “KAWI PACT”
DAN “HILANGNYA” TAN MALAKA**

**Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII
Di Jakarta, 14-17 November 2006
Tema “Tepian Ruang dan Waktu: Tantangan Sejarah”**

**Oleh: Nur Hadi
Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang**

**JAKARTA
2006**

GERAKAN “KAWI PACT” DAN “HILANGNYA” TAN MALAKA

Oleh: Nur Hadi

ABSTRAK

Tan Malaka, salah seorang pejuang menuju kemerdekaan RI yang kontroversial. Keberadaannya sering misterius, baik kemunculan dalam panggung Pergerakan Nasional, maupun akhir dari karir politik dan perjuangannya. Latar belakang ini yang menarik peneliti melakukan kajian kritis dan holistik terutama menyangkut masalah perjuangan GRN dalam bingkai “Kawi Pact” dan masa akhir hayat Tan Malaka.

Masa-masa krusial di seputar pergolakan politik nasional setelah merdeka, ditandai dengan upaya saling melenyapkan masing-masing kekuatan politik dalam merebut hegemoni sebagai pewaris sah Republik. Intrik yang terjadi menempatkan pergulatan antara kekuatan politik yang nyata-nyata berbeda ideologi, maupun sayap yang berbeda dari sebuah kekuatan politik yang sebenarnya seazas. Situasi itu yang menyebabkan Tan Malaka memimpin “Persatuan Perjuangan” yang beroposisi terhadap Kabinet Sjahrir, dan terakhir ketidak percayaannya terhadap Proklamasi Soekarno-Hatta. Situasi itu yang melahirkan gerakan revolusioner di lereng Gunung Kawi, Malang Selatan.

Merekonstruksi peristiwa “Kawi Pact”, dan terutama meninggalnya Tan Malaka tidak mudah, sebab nuansa politisnya yang sangat kental dan berlawanan dengan aspirasi umum pemegang kekuasaan. Data berupa arsip atau dokumen hasil masa itu hanya memberitakan hal yang datar menyangkut situasi politik nasional pasca kemerdekaan. Situasi itu menyebabkan saya melakukan pendekatan penelitian kualitatif, dengan wawancara mendalam pada pelaku yang terlibat penanganan peristiwa itu dari Brigade IV, terutama menyangkut aspirasi dan perjalanan gerakan, serta “hilangnya” Tan Malaka. Uji kompilasi silang dilakukan terhadap seorang pimpinan Brigade (dari Kelasykaran) yang diakui sebagai bagian atau Slagorde gerakan itu.

Hasil kajian: secara umum dapat dikatakan bahwa Gerakan “Kawi Pact” dibentuk sebagai koreksi sekaligus resistensi terhadap Proklamasi Soekarno-Hatta yang dianggap banyak penyimpangan. Gerakan ini mampu merangkul sebagian dari kesatuan organik Be IV yang bersimpati, serta beberapa kesatuan/kelasykaran lepas yang ada di Malang. Tan Malaka diculik dalam acara pertemuan di Nganjuk oleh kesatuan dibawah Be IV, dan dengan pertimbangan kepentingan stabilitas politik waktu itu berita ini tidak diekspos.

Kata-kata Kunci: Gerakan Politik, “Kawi Pact”, Meninggalnya Tan Malaka.

A. PENDAHULUAN

Tan Malaka seorang pejuang nasional menuju kemerdekaan, yang telah memperoleh pengakuan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

berdasarkan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1963. Ia seorang tokoh legendaris yang dipuja banyak orang, antara lain Adam Malik. Tan Malaka adalah seorang pemikir yang genius, hal ini terlihat pada buku-buku yang telah diciptakannya, seperti *Gerpolek*, *Madilog*, dan lain-lain, yang ditulis dalam pelarian yang ia jalani, dan sering naskah itu hilang (sebagian) atau rusak dalam suasana pelarian. Ia juga seorang tokoh pejuang yang amat misterius dan banyak aktifitasnya dilakukan di luar negeri sambil menuntut ilmu di Negeri Belanda. Sepak terjang yang dilakukannya memiliki kaliber internasional, seperti di *Komintern*. Sedangkan di dalam negeri ia mula-mula terjun sebagai seorang guru di perkebunan Senembah di Tanjungmorawa, Deli, Sumatera Utara. Disini ia lihat betapa sistem kapitalis telah menyengsarakan bangsanya, dan hal ini semakin memperkuat keyakinannya terhadap kebenaran teori *Marxisme-Komunisme*. Ia kecewa terhadap beberapa organisasi besar seperti SI, BU maupun IP karena kurang memberikan perhatian terhadap nasib kaum buruh di bawah penindasan *Kapitalisme*. Ia keluar sebagai guru di Tanjung Morawa dan masuk ke kancah politik untuk bergabung dengan PKI. Sebagai seorang pemikir ia sering tidak cocok dengan gagasan PKI (*ortodoks*), termasuk ketidak setujuannya terhadap rencana pemberontakan melawan pemerintah Kolonial Belanda 1926/1927 yang kemudian gagal. Ia kemudian secara rahasia mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di luar negeri. Itu sebabnya di dalam negeri namanya “kurang bergaung” dibandingkan Soekarno atau Hatta.

Gagasan-gagasan utamanya bersifat anti kolonialisme

dan anti kapitalisme yang dengan gigih dan tanpa kompromi ia pertahankan, telah membuka ruang bagi terbentuknya kekuatan-kekuatan yang pro maupun anti dirinya. Segala sepak terjang yang telah dilakukannya banyak menarik minat untuk ditulis oleh para pengamat ataupun sejarawan. Tulisan ini tidak untuk membeber kembali riwayat kehidupan Tan Malaka seperti yang sudah banyak dipublikasikan. Fokus dari kajian ini adalah menyangkut masa yang gelap dan belum banyak dikupas tentang akhir dari perjuangan hidup Tan Malaka di daerah Malang.

B. GERAKAN TAN MALAKA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN

Tan Malaka, yang memiliki nama kecil "Ibrahim", (Poeze, 1988:12) mulai muncul di Ibu Kota pada hari-hari sekitar Proklamasi. Ia terjun langsung ke gelanggang perebutan hegemoni politik pada kurun *Revolusi Phisik*, ketika para pemimpin Republik lebih menyukai jalan "moderat" dalam perjuangan menghadapi kembalinya Belanda, ia menentang dan membentuk kekuatan oposisi yang diberikan nama Persatuan Perjuangan (PP). Kekuatan ini melakukan resistensi terhadap Kabinet Sjahrir, yang dianggap terlalu lemah dalam perjuangan menghadapi kembalinya penjajah Belanda. Sebagaimana diketahui kelompok PP menginginkan pengakuan kemerdekaan Indonesia 100%, dan baru atas dasar pengakuan itu dilakukan perundingan kedua belah pihak antara RI dan Belanda. Tuntutan PP dengan ini dikatakan didasari isi Proklamasi, Konstitusi dan perjuangan kemerdekaan. Atas dasar ini kekuatan-kekuatan yang anti Sjahrir seperti PNI, PBI dan Masjumi berhimpun membuat *Triple Party-agreement*, yang menghendaki politik kemerdekaan 100% dan

kabinet baru atas dasar itu. Kabinet Sutan Sjahrir mesti runtuh dan koalisi kabinet harus dibentuk. Gabungan desakan ini adalah besar dan boleh dikatakan sempurna, karena *triple party* pada waktu itu adalah suara tiga *platforms*: Islam, Nasionalisme dan Sosialisme-proletaris, sebagai bagian pecahan persatuan pergerakan kemerdekaan Indonesia (Yamin, 1956: 54). Akibat kerasnya perlawanan yang dilakukan, beberapa tokoh PP yang juga tokoh MURBA, seperti Yamin, Gatot, Abikusno, Sukarni, Chairul Saleh dan Tan Malaka ditangkap dan dipenjarakan (Yamin, 1956: 64). Kondisi ini kemudian menjurus pada avonturir politik dengan terjadinya Peristiwa 3 Juli 1946. Dinamika politik nasional kemudian bergulir dengan jatuh dan banggunya kembali Kabinet Sjahrir.

C. GAGALNYA FDR/PKI DI MADIUN

Peristiwa pemberontakan FDR/PKI di Madiun pada tahun 1948 serta keberhasilan pemerintah menghancurkannya, telah memberikan peluang politis bagi MURBA sebagai rivalitas PKI dalam mengembangkan gerakan politiknya yang selama itu mengalami kegagalan, seperti pada Peristiwa 3 Juli 1946.

Bersamaan dengan keluarnya Tan Malaka dari penjara pada tahun 1948, mulailah ia menggiatkan kembali gerakan politik yang dikenal dengan GPP (*Gerakan Pembela Proklamasi*). Ia beranggapan bahwa Soekarno-Hatta adalah kompromistis menghadapi musuh perjuangan yaitu Belanda.

Murba dengan isu politik permanen nonkompromi, menghadapi situasi setelah Perundingan Renville, dengan daerah Republik hampir tiga perempat bagian dikuasai oleh pihak Belanda. Sementara itu keadaan didalam negeri

amat memprihatinkan dengan adanya penghijrahan dan pengosongan daerah-daerah kantong, pasca RE-RA (Reorganisasi dan Rasionalisasi), dan mulai dilaksanakannya tekanan ekonomi sebagai akibat blokade ekonomi Belanda. Situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan ini telah dimanfaatkan MURBA untuk memunculkan gerakan politiknya serta melakukan konsolidasi di daerah Malang Selatan (daerah sekitar Gunung Kawi). Gerakan tersebut menggunakan komponen-komponen kekuatan fisik yang ada dan memungkinkan digerakkan dengan pengaruhnya untuk mewujudkan gagasan pembentukan Negara Demokrasi Indonesia pimpinan Tan Malaka (wawancara dengan Mochlas Rowie di Jakarta, 1991).

D. PEMBENTUKAN *GERAKAN PEMBELA PROKLAMASI (GPP)-KAWI PACT*

Pada awal upaya memformulasikan kekuatan yang akan dibentuk, mula-mula dilakukan pertemuan-pertemuan yang bersifat militer dengan dihadiri oleh: A. Djakarsi dari Mobile Brigade, Isman dari TRIP Brigade XVII, Budijono dari Batalyon Samodra, Worang dari Batalyon "B", Kru "X", Abdullah dari Batalyon VII, Markadi dari Kompi Markadi, dan Djainal Alimin dari Brigade XIII (Djarwadi, 1959: 68) (Juga wawancara dengan Djainal Alimin di Malang, 1994).

Pertemuan yang semula bersifat militer murni berhasil membentuk GPP (*Gerakan Pembela Proklamasi*). Gerakan ini kemudian dibelokkan ke arah visi politik tertentu. Hal tersebut diteruskan dengan mengadakan "*move-move*" yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada tahun 1948, tepatnya Bulan Desember saat Belanda melakukan Agresi Militer II, dengan menyerbu RI, termasuk ke daerah Malang, Mayor Mochlas Rowie mendapatkan tugas sebagai Komandan Daerah Gerilya III (MG=Malang Gerilya) III, yang kemudian berdasarkan instruksi MBKD (Markas Besar Komando Djawa) menjadi SWK (*Sub Wehrkreise*) III di Malang Selatan, yang merupakan satu-satunya daerah Republik yang pada waktu itu masih dikuasai pemerintah RI di daerah Karesidenan Malang, meliputi Kawedana Kepanjen, Kawedanan Turen dan Kawedanan Pagak.

Pada waktu bergerilya SWK III membawahi 2 sektor serta menguasai wilayah sekitar perbatasan Kediri-Wlingi-Malang.

Sektor 1, berkedudukan di Sumber Pucung, di bawah pimpinan kapten Nailun Hamam. Semula ia adalah Komandan Depo Batalyon yang juga berkedudukan di daerah Sumber Pucung.

Sektor 2, berkedudukan di Pagak, di bawah pimpinan Lettu Abd. Munir.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, tugas masing-masing sektor sudah ditentukan berdasarkan instruksi MBKD bahwa sektor merupakan daerah pertempuran dan daerah pemerintahan. Dalam rangka itu, kedua sektor tersebut merupakan bagian dari lingkungan Brigade IV /Malang, yang semula bersama Brigade III/Besuki menjadi satu Divisi yaitu Divisi VII/Untung Surapati. Brigade IV kemudian dipimpin oleh Letkol DR. Soejono dan Brigade III dipimpin Letkol. Moh. Soeroedji, yang berlangsung sejak RE-RA (Restrukturisasi dan Rasionalisasi).

Di daerah Brigade IV juga terdapat satu Brigade Mobil, yaitu Brigade

XVI/Warrow, yang secara militer ditentukan sebagai cadangan dari pasukan RI dengan komandannya, Warrow. Keberadaan Brigade ini perlu dikemukakan sehubungan dengan banyaknya keterlibatan mereka dengan GPP Tan Malaka. Proses pembentukan Brigade yang banyak anggotanya berasal dari Sulawesi tersebut dilakukan di Solo. Warrow sendiri adalah orang Sulawesi Utara. Brigade ini ditugaskan oleh MBKD menjadi tenaga yang mobil untuk membantu Jawa Timur, mulai dari Kediri dan kemudian ke Malang untuk menghadapi pasukan Belanda. Jadi ia tidak memiliki wilayah secara khusus. Di Kediri Brigade ini ikut membantu pasukan Brigade Surakhmat, kemudian sewaktu di Malang ikut KMD Malang. Sewaktu di Malang Brigade ini mengambil kedudukan di tapal batas antara Malang-Kediri, di Wlingi bagian utara, tepatnya di lereng Gunung Kawi. Sebagai komandan Brigade yang berkedudukan di daerah Malang ia seharusnya memberitahukan keberadaannya kepada KMD Malang, Letkol DR. Soedjono, namun hal itu tidak dilakukannya.

Jika diamati kembali kehadiran GPP, bahwa semula GPP banyak mendapatkan simpati banyak pihak, tetapi ketika gerakan ini diblokkan ke arah suatu visi politik tertentu (kiri), banyak kesatuan yang mengundurkan diri.

Pada suatu kesempatan dalam bulan Januari 1949 telah diadakan pertemuan besar bertempat di Kali Tapak (Kawi Selatan), tampak kecenderungan dari GPP kearah suatu *trend* tertentu. Hal ini dapat dilihat dari para pemrasaran dalam pertemuan tersebut yang seluruhnya kaum politisi. Beberapa kesatuan telah meninggalkan pertemuan, seperti Batalyon XVII dan utusan Korps Mahasiswa.

Sesungguhnya banyak kalangan yang tidak setuju dengan langkah-langkah revolusioner yang ditempuh Tan Malaka cs. Dengan pendirian Negara Demokrasi Indonesianya. Seperti diketahui, bahwa pembentukan Negara Demokrasi Indonesia tersebut didirikan dengan mengambil momentum yang dianggap tepat, yaitu ketika Belanda masuk Yogyakarta, 19 Desember 1948. Ketika itu, diumumkan bahwa Soekarno-Hatta tertangkap. Dengan alasan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak ada, Tan Malaka memproklamasikan berdirinya GPP (*Gerakan Pembela Proklamasi*) di atas Gunung Kawi. Lahirlah kemudian Gerakan *Kawi Pact* yang bertujuan untuk meneruskan cita-cita komunisme ala Tan Malaka. Ia memproklamasikan berdirinya Negara Demokrasi Indonesia dengan dalih, bahwa pemerintah RI Soekarno-Hatta sudah tidak ada. Pengumuman berdirinya Negara Demokrasi Indonesia, sekaligus dilakukan dengan penunjukan dirinya sebagai Presiden, dengan mengangkat Kolonel Warrow sebagai Menteri Pertahanan dan Mayor Sabaruddin sebagai Panglima Besar GPP.

Beberapa kesatuan sempat dipengaruhi oleh Tan Malaka dan kawan-kawan. Diantaranya yang secara riil masuk dalam jaringan kekuatan tersebut adalah pasukan Letkol Soepardi dari Brigade Kelasykaran (Brigade XIII). Di Brigade XIII Letkol Soepardi menjabat sebagai Staf Politik. Di samping itu satu kompi pasukan dari Mochlas Rowie, yaitu Kompi Hanafi Terpedo Berjiwa ikut serta masuk GPP. Kesatuan lain yang juga ikut masuk adalah dari Brigade XVI, diantaranya pasukan Batalyon Worang dan Batalyon Abdullah yang turut bergerak ke daerah Kawi. Atas prakarsa Tan Malaka kemudian dibentuk *Kawi*

pact, seperti dikemukakan di atas, yang juga dimaksudkan untuk mengikat unsur-unsur kesatuan yang ada dalam satu ikatan GPP.

Secara ekspansif GPP menuntut seluruh wilayah Gunung Kawi, wilayah Kediri dan Malang untuk diserahkan kepada mereka. Letkol DR. Soedjono sebagai Komandan Brigade IV menolak keras tuntutan itu sebab kekuasaan atas wilayah Komando Militer di Malang adalah dalam tugas pengamanannya.

Adapun Mochlas Rowie selaku Komandan SWK, telah memperingatkan kepada Lettu Hanafi (anak buahnya), bahwa semua pasukan yang ada di SWK III KMD Malang harus tunduk kepada pimpinan KMD Malang. Dan juga disampaikannya bahwa tidak ada pemerintah lain selain pemerintah RI, yang sekarang menjelma menjadi pemerinatah militer di daerah-daerah. Jadi kalau ada pasukan yang mengikuti gerakan tidak sah di luar Republik, mereka itu pemberontak. Oleh karena itu, diingatkan kepada Komandan Kompi Hanafi dan anak buahnya agar lekas kembali ke kesatuan semula, yaitu di wilayah KMD Malang dan tetap berstatus sebagai tentara RI. Instruksi ini menimbulkan polemik karena komandan Kompi yang bersangkutan setelah menerima instruksi ini, meneruskannya kepada Panglima Besar GPP Sabaruddin. Yang kemudian mengirimkan surat balasan secara panjang lebar bahwa sebenarnya dialah yang lebih konsekuen membela Republik.

Mochlas Rowie mengatakan, bahwa berkaitan dengan Sabaruddin, perlu diketahui beberapa hal, bahwa ia adalah seorang bekas narapidana dan seorang petualang dari Sidoarjo. Ia sebenarnya pernah mendapatkan pendidikan PETA, kemudian mengaku sebagai PM (Polisi Militer) di daerah

Sidoarjo. Dengan cara itu ia menangkap dan membunuh orang-orang yang tidak disukainya, termasuk Shodancho Sidoarjo, yaitu Budiardjo (yang pada tahun 1945 pernah menjadi Komandan Sabaruddin) karena masalah pribadi. Jadi sesungguhnya, banyak kegiatan kriminal yang telah dilakukannya, sehingga oleh panglima Divisi Brawijaya, Kolonel Soengkono, ia ditangkap dan dipenjarakan di Kediri. Jadi Sabaruddin bukanlah seorang kader Komunis yang mengerti apa paham Komunis seperti Tan Malaka, tapi hanya seorang petualang yang haus kekuasaan dan kedudukan. Jika ada tantangan yang berhubungan dengan kekuasaan dan kedudukan, dia akan masuk. Hal ini utamanya berkaitan dengan GPP, yang memberikan kedudukan kepadanya sebagai seorang Panglima Besar.

Keberadaan GPP di daerah Malang amat mengganggu konsentrasi TNI reguler di wilayah ini untuk menghadapi pertempuran dengan pasukan Belanda. Terasa bahwa TNI di wilayah ini menghadapi dua kekuatan sekaligus, yaitu di samping menghadapi pasukan Belanda yang kelihatan nyata dan jelas sebagai musuh untuk dihadapi, mereka juga menghadapi kesatuan-kesatuan GPP yang menusuk TNI dari belakang tanpa bisa diduga sebelumnya. Sabaruddin dan pasukannya yang terdiri dari para narapidana dari penjara Kediri yang telah direhabilitasi oleh Pak Soengkono ternyata lebih banyak mengganggu keamanan dan ketertiban daripada membantu berjuang melawan Belanda.

Walaupun Soekarno-Hatta sudah ditangkap, pada waktu itu TNI tetap mengikuti pengakuan bahwa pemerintah RI tidak hilang. Selain PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) yang berkedudukan di Bukittinggi

dengan Presiden Mr. Sjafruddin Prawiranegara, kekuasaan di Jawa dipegang oleh Pemerintah Militer Komando Djawa dengan Markas Besar Komando Djawa (MBKD) dipegang oleh Kolonel Nasution sebagai pemerintah pembela Republik. Oleh karena itu, pemerintah militer di Jawa di bawah pimpinan Jenderal Soedirman dan Nasution dijadikan sebagai pegangan. Jenderal Soedirman tidak pernah menyerah kepada Belanda, dan tetap melanjutkan perjuangan walaupun menderita sakit keras.

Dengan aktifitas memproklamasikan berdirinya *Negara Demokrasi Indonesia* yang tidak sejalan dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, yang dilakukan oleh Tan Malaka dengan mengangkat seorang Warrow dan Sabaruddin sebagai pucuk pimpinan militer GPP, menjadi tantangan tersendiri bagi TNI di wilayah Malang.

Sebagaimana yang telah terungkap di atas, bahwa beberapa oknum Brigade XVI di wilayah Brigade IV bukannya membantu tugas Brigade IV berjuang melawan Belanda, tetapi justru sebaliknya banyak kerugian yang disebabkan oleh kehadiran mereka di dalam kesatuan GPP. Mereka telah beberapa kali menyerbu dan melucuti persenjataan TNI reguler Malang. Sebagaimana biasanya, sesudah melakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda, TNI lari ke gunung. Tetapi mereka kesatuan GPP menyerang TNI. Akibatnya terjadi perang saudara, yaitu antara pasukan Brigade IV dan oknum Brigade XVI, meskipun berskala kecil. Insiden yang mereka lakukan antara lain, perlucutan senjata kesatuan-kesatuan Brigade IV di daerah Singosari, baik yang dilakukan terhadap pasukan Sumeru maupun pasukan Moergito. Hal itu

membuktikan bahwa GPP kurang profesional dalam berjuang, serta sebagai suatu tindakan indisipliner militer karena mencoba secara aktif merusak tatanan hubungan koordinasi TNI dalam rangka menghadapi pasukan Belanda. Hal yang sama, juga dilakukan oleh pasukan Kompi Tenges dari GPP terhadap pasukan dari Nailun Hamam.

Mochlas Rowie selaku Komandan SWK III mencoba menyelesaikan masalah pelucutan senjata tersebut. Ia dengan berjalan kaki selama dua hari dari markas SWK di pagak dan menemui sendiri Komandan Brigade XVI di Wlingi. Selanjutnya dicapai persetujuan bahwa senjata-senjata yang sudah dirampas harus dikembalikan sebab sangat dibutuhkan TNI yang sedang menghadapi Belanda. Sebab saat itu pasukan Belanda menguasai jalan-jalan raya antara Surabaya-Malang dan juga Malang-Kediri.

E. KEMATIAN MISTERIUS TAN MALAKA (AKHIR GPP)

GPP dianggap sebagai bentuk penyimpangan politik yang sangat prinsip berkaitan dengan ideologi negara. Pada waktu yang hampir bersamaan (saat Soekarno-Hatta ditangkap), Karto Suwirdjo memproklamasikan berdirinya *NII* (Negara Islam Indonesia) dengan *DI/TII* nya (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat. Di daerah Jawa Timur, tepatnya di atas Gunung Kawi, Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Negara Demokrasi Indonesia. Jadi dari sisi kepentingan negara kedua-duanya dianggap memberontak terhadap pemerintah RI.

Gerakan yang telah dilakukan oleh Tan Malaka dan kawan-kawannya sebagai gerakan politik dengan menyebarkan berbagai propaganda untuk

meluaskan berita adanya GPP dan Negara Proklamasi di luar RI. but. Secara militer gerakan mereka hanya di gunung-gunung, dan kurang memberikan pukulan terhadap pasukan Belanda, hingga kontribusi yang diberikan GPP terhadap perjuangan nasional ketika itu kurang berarti, bahkan kehadiran mereka merupakan ancaman dan gangguan terhadap stabilitas kawasan Malang secara khusus, dan stabilitas nasional sebagai keseluruhan. Namun demikian terdapat suatu momentum penting yang mengakhiri masalah itu dengan dicapainya persetujuan gencatan senjata (*"cise fire order"*) antara TNI dengan Belanda. Dengan persetujuan itu semua tentara yang dibentuk (Kelasykaran) harus dikonsolidasikan kembali menjadi TNI, seperti beberapa kesatuan di GPP, seperti pasukan Warrow kembali bergerak secara legal menjadi TNI dan dikirim ke luar Jawa dalam ekspedisi ke Ambon untuk menumpas RMS dengan kekuatan riil dua Batalyon yaitu Batalyon Worang dan Batalyon Abdullah.

GPP tidak sempat berkembang sebab keburu dicapai perjanjian gencatan senjata antara TNI dengan pasukan Belanda. Dalam kesempatan itu, para Komandan Batalyon di Jawa Timur dipanggil seluruhnya untuk mengadakan rapat di Nganjuk, tepatnya di Desa Gondang, oleh Panglima Divisi I/Brawijaya Kolonel Soengkono. Dalam hal ini Soengkono sudah mendapatkan laporan dari para intel dan pimpinan Brigade IV dan KMD Malang tentang kegiatan Sabaruddin, Tan Malaka dan kawan-kawannya. Oleh karena itu, Soengkono menginstruksikan kepada PM untuk menangkap Sabaruddin pada kesempatan rapat di Nganjuk, kemudian membawanya ke Madiun. Di

perjalanan Sabaruddin dieksekusi (cerita dari PM yang mengerjakan). Demikian pula dengan Tan Malaka.

Kawi Pact belum dapat mengembangkan misinya ataupun ide-idenya akibat segera dicapai persetujuan gencatan senjata. Ketika terjadi persetujuan gencatan senjata itu Tan Malaka masuk ke Gunung Kawi (ikut bergerak) dan bersama sebagian pasukan GPP ditangkap oleh aparat intel Panglima Divisi I/Brawijaya. Menurut Mochlas Rowie, bersama Sabaruddin ia telah “diambil” karena dianggap sebagai bisul yang mengganggu dan berbahaya bagi kelangsungan perjuangan bangsa. Kondisi negara yang kritis, di tengah situasi revolusi yang bergerak dinamis, menyebabkan sesuatu yang dianggap berbahaya sekecil apapun terhadap stabilitas nasional harus diambil secara tegas dan lugas, termasuk terhadap Tan Malaka dengan GPP dan *Kawi Pact* nya tanpa melalui proses hukum linier. Berita selanjutnya tidak diketahui tentang keberadaan Tan Malaka. Gaung dari *Kawi Pact* ini kemudian kembali sepi, sesepi kepergian tokoh penggeraknya, Tan Malaka (Nur Hadi dan Sutopo, 1997: 306-307).

F. SIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan tersebut dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Tan Malaka adalah seorang pejuang yang tanpa kompromi. Ia teguh pada pendirian, sehingga sering bertabrakan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak sepaham dengannya pada berbagai eposode perjuangan. Keyakinan yang dipertahankannya dengan gigih tersebut sering

membawa bencana baginya. Dari masa Pergerakan Nasional sampai masa *Revolusi Phisik* ia menjadi seorang pejuang yang militan, radikal dan revolusioner. Akibat tanpa kompromi itu ia sering menemui kegagalan dan bahkan harus mendekam *Dari Penjara ke Penjara*.

2. Apa yang dilakukan Tan Malaka dalam bentuk tindakan-tindakan politik seringkali berdasarkan pemikiran-pemikiran yang amat mendalam, dan paham atau keyakinan diri yang kuat, atau sebaliknya apa yang ia pikirkan akan dilakukannya dalam bentuk tindakan-tindakan politis. Dua sisi sebagai seorang pemikir sekaligus pelaku politik yang konsisten terdapat dalam diri pribadinya. Ini yang membuat ia disegani sekaligus dianggap sebagai ancaman.
3. Intrik politik nasional yang terjadi pada masa *Revolusi Phisik* telah memaksanya untuk tampil sebagai seorang tokoh atau pelopor gerakan revolusi, dan ia gugur dalam pergolakan untuk mempertahankan keyakinannya. Ia telah dibunuh oleh TNI yang sesungguhnya adalah “kawan” seperjuangan dalam menghadapi kembalinya kolonialisme Belanda. Tapi dinamika politik yang terjadi pada waktu itu memaksanya tampil dan menjadi korban dari situasi pergolakan politik yang bergerak dan berputar secara liar. Ia meninggal secara misterius tanpa diketahui dimana makamnya.

G. REKOMENDASI

Dalam pandangan banyak kalangan, wacana tentang *Marxisme-Komunisme* sering kali hanya dilihat dari satu sudut, termasuk melihat para tokoh yang terlibat dalam berwacana maupun beraktifitas politik tentang masalah itu. Dari pengalaman sejarah hidup Tan Malaka perlu direnungkan secara mendalam, bahwa ternyata pandangan politik seseorang yang berbau kiri itu ternyata tidak hanya satu dan berjalan secara linier. Diperlukan kearifan untuk melihat dan menilai suatu fenomena sosial secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarwadi, Radik. 1959. *Pradjurit Mengabdikan, Gumpalan Perang Kemerdekaan Batalyon Y*. Bandung: Publikasi Resmi Pusat Sedjarah Militer.
- Malaka, Tan. 1999. *Madilog Materialisme Dialektika Logika*. Jakarta: Pusat Data Indikator
- Malaka, Tan. 2000. *gerpolek*. Yogyakarta: Jendela.
- Nur Hadi dan Sutopo. 1997. *Perjuangan Total Brigade IV Pada Perang Kemerdekaan di Karesidenan Malang*. Malang: IKIP Malang.
- Poeze, Harry A. 1988. *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik 1897-1925*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Prabowo, Hary. 2002. *Perspektif Marxisme Tan Malaka: Teori dan Praksis Menuju Republik*. Yogyakarta: Jendela.
- Yamin, Muhammad. 1956. *Sapta Darma*. Bukittinggi-Djakarta-Medan: N.V. Nusantara.

Wawancara dengan:

1. Mochlas Rowie di Jakarta, 17 Maret 1991.
2. Djainal Alimin di Malang, 20 Mei 1994.

BIODATA

Nama Lengkap : Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si
NIP : 131807089
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala
Jurusan/Fak : Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang
(UM)
Alamat : Jl. Danau Semayang VIII Blok C2C-07 Perumnas
Sawojajar Malang
Telepon : 0341-712052 H.P: 08125236444

Karya Tulis:

1. Nur Hadi dan Sutopo. 1997. *Perjuangan Total Brigade IV Pada Perang Kemerdekaan di Karesidenan Malang*, Penerbit IKIP Malang (ISBN: 979-495-371-7)
2. Nur Hadi (Ed.). 2000. *TKR Divisi VII Untung Suropati Malang – Besuki 1945-1948*. Malang: UM Pres (979-495-444-6)
3. Ismain, Kasimanuddin dan Nur Hadi (Ed.). 2003. *Sejarah dan Budaya Dari Masa Kuno Sampai Kontemporer*. Malang: UM Press (979-495-536-1)

Karya Penelitian:

1. Nur Hadi, dkk. 1986. *Penelitian Kepurbakalaan Bali*. IKIP Surabaya.
2. Nur Hadi, dkk. 1990. *Penelitian Pengaruh Modernisasi Terhadap Adat Budaya Masyarakat Tengger, Desa Ngadisari*. Malang: Puslit IKIP Malang.
3. Mustopo, M. Habib. Dan Nur Hadi. 1990. *Studi Kelayakan Objek-Objek Wisata Budaya Maupun Alam Sebagai Daya tarik Wisatawan di Kabupaten Malang*. Malang: Puslit IKIP Malang.
4. Nur Hadi. 1993. *Penelitian Adat Istiadat Masyarakat Samin dalam Pengaruh Modernisasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur*. Malang: Puslit IKIP Malang.
5. Adi Pratjaja dan Nur Hadi, 1996. *Makna Kehidupan Industri Bagi Masyarakat Tengger*. Malang: Lemlit IKIP Malang.
6. Sri Sumartini dan Nur Hadi . 2002/2003. *Penelitian Wacana Kyai Tentang Kesetaraan Gender Bidang Politik*. Malang: Lemlit UM.
7. Nur Hadi dan M. Dwi Cahyono. 2003-2004. *Penelitian Arkeologi Sejarah Kutai*. Kerjasama Pemkab Kutai kartanegara dengan Universitas Negeri Malang.
8. Nur Hadi. 2005. *Penelitian Pergeseran Makna Ritus Tradisional Tengger*. Malang: Lemlit UM.
9. Nur Hadi. 2006. *Resiko Peran Ekonomi Ibu Rumah Tangga Bagi Keluarga Batih*. Malang: Lemlit UM.

Pertemuan Ilmiah:

1. Pemakalah dan partisipan aktif pada sejumlah seminar dan lokakarya tingkat nasional ataupun regional.
2. Pidato Lektorat, *Studi Etnografi di Gunung Kemukus*, Fakultas Sastra UM, Agustus 2004.
3. Pemakalah Pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia Ke-3, Tema: "*Membangun Kembali 'Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika': Menuju Masyarakat Multikultural*", dengan judul makalah Pergeseran Makna Ritus Kasada. Bali: 16-19 Juli 2002.

